

## PENGARUH KONFLIK INTERNAL DAN TERORISME TERHADAP STABILITAS KEAMANAN DI KAWASAN SUB-SAHARA AFRIKA

Sudarso Pursito<sup>1</sup>

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

### ABSTRACT

Almost every part of the African continent is plagued by insecurity triggered by political instability, both caused by the state and parties opposing the state. The latest data from the Uppsala Conflict Program, Global Terrorism Database, United States Institute for Peace, reveals that between 1970 - 2020 there were many armed conflicts, rebellions, and terrorism, in Africa becoming so unstable that it hampers its ability to develop for the African continent and beyond. Therefore, this study will focus on how internal conflict and terrorism that occur in Africa, especially in the Sub-Saharan Region, have an impact on the stability of regional security. In addition, this study will also discuss how the impact of internal conflict and terrorism on security stability in Sub-Saharan Africa. The research method used is a descriptive qualitative method with research techniques using observational methods and literature studies. The results of the study show that there is a close relationship between terrorism and internal conflict, where the two often reinforce each other. Terrorist groups and criminals often rely on the spread of weapons and weak borders to carry out their actions. Terrorism and internal conflict pose serious risks to national and international security. These acts threaten political stability, economic growth, and social cohesion, as well as causing deaths and property damage. Therefore, resolving these issues is essential to maintaining stability and peace.

**Keywords:** Africa, Internal Conflict, Terrorism, Security.

### ABSTRAK

Hampir setiap bagian dari benua Afrika dilanda oleh wabah ketidakamanan yang dipicu oleh ketidakstabilan politik, baik yang disebabkan oleh negara maupun pihak-pihak yang menentang negara. Data terbaru dari *Uppsala Conflict Program, Global Terrorism Database, United States Institute for Peace*, mengungkapkan bahwa antara tahun 1970 - 2020 banyak terjadi konflik bersenjata, pemberontakan, dan terorisme, di Afrika menjadi sangat tidak stabil sehingga menghambat kemampuannya untuk berkembang bagi benua Afrika dan sekitarnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana konflik internal dan terorisme yang terjadi di Afrika khususnya, di Kawasan Sub-Sahara berdampak kepada stabilitas keamanan Kawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara terorisme dan konflik internal, dimana keduanya sering kali saling memperkuat. Kelompok teroris dan pelaku kriminal sering kali bergantung pada penyebaran persenjataan serta perbatasan yang lemah untuk menjalankan aksi mereka. Terorisme dan konflik internal menimbulkan risiko serius bagi keamanan nasional maupun internasional. Tindakan-tindakan ini mengancam stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan kohesi sosial, selain juga menyebabkan kematian serta kerusakan properti. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini sangat penting untuk menjaga stabilitas dan perdamaian.

**Kata kunci:** Afrika, Konflik Internal, Terorisme, Keamanan.

### PENDAHULUAN

Afrika Subsahara termasuk negara-negara Afrika di selatan Gurun Sahara. Zona Transisi Afrika melintasi tepi selatan Gurun Sahara di bagian terluas benua. Banyak negara di Zona Transisi Afrika termasuk dalam wilayah Afrika Subsahara. Ranah dapat dipecah lebih lanjut menjadi komponen regional: Afrika Tengah, Afrika Timur, Afrika Barat, dan Afrika Selatan. Di ujung timur Zona Transisi Afrika adalah Tanduk Afrika, yang sering termasuk dalam wilayah Afrika Timur. Peta bervariasi dalam hal negara mana yang disertakan di setiap wilayah, tetapi perincian geografis umum ini membantu dalam mengidentifikasi lokasi dan karakteristik negara. Madagaskar adalah sebuah pulau besar di lepas pantai tenggara Afrika dan biasanya tidak termasuk dengan wilayah lain karena kualitas geografis dan keanekaragaman hayati yang sangat berbeda dari daratan Effendi, J. (2021).

Afrika sub-Sahara adalah istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan negara-negara di benua Afrika yang tidak dianggap termasuk bagian Afrika Utara. Pada abad ke-19, di Eropa dan Dunia Barat wilayah ini kadang-kadang disebut sebagai Black Africa atau Afrika Hitam. Afrika secara keseluruhan umumnya dahulu dikenal sebagai "benua Hitam", sebuah istilah yang sebetulnya biasanya dimaksudkan untuk menyebut wilayah Sub-Sahara. Pemakaian istilah ini sebagian disebabkan oleh warna kulit penduduk pribumi di sana dan sebagian lagi terutama disebabkan oleh karena benua itu belum sepenuhnya dipetakan atau dijelajahi oleh orang-orang Barat. Istilah-istilah ini pada masa sekarang sudah menjadi istilah yang usang atau kuno, dan malah sering dianggap sebagai istilah yang melecehkan. Lebih lanjut, istilah ini sering kali menyesatkan, karena banyak orang Afrika yang berkulit hitam juga merupakan pribumi di Afrika Utara.

Sejak akhir Zaman es, wilayah Afrika utara dan sub-Sahara telah dipisahkan oleh iklim yang luar biasa keras di daerah Gurun Sahara yang jarang penduduknya, membentuk sebuah rintangan alami yang dilalui hanya oleh Sungai Nil. Istilah masa kini untuk "sub-Sahara" digunakan untuk memperlihatkan gambaran umum bahwa Utara sebagai bagian atas dan Selatan sebagai bagian bawah. Afrika Tropis adalah sebuah alternatif nama modern, yang digunakan untuk ekologi tropis dari wilayah tersebut. Namun, jika dipergunakan secara saksama, istilah ini akan mencakup juga Afrika Selatan, yang sebagian besar wilayahnya ada di luar wilayah Tropis garis katulistiwa bumi. Pada umumnya, Afrika Sub-Sahara adalah wilayah termiskin di dunia, yang diakibatkan oleh warisan penjajahan kolonial, neokolonialisme, konflik antar-etnis, dan perselisihan politik. Wilayah ini terdiri dari banyak negara-negara paling terbelakang di dunia. Afrika Sub-Sahara, khususnya Afrika Timur, dinyatakan oleh ahli ilmu genetika sebagai tempat kelahiran ras manusia. Afrika Sub-Sahara merupakan situs dari banyak kekaisaran dan kerajaan, termasuk Nubia, Axum, Wagadugu (Ghana), Mali, Nok, Songhai, Kanem-Bornu, Benin, dan Zimbabwe Raya.

Sejak awal abad ke-21 dan kembalinya demokrasi di mayoritas negara-negara Afrika, isu-isu terkait ketidakstabilan politik dan ketidakamanan telah mendominasi diskursus kontinental mengenai kemajuan benua tersebut. Setelah keluar dari cengkeraman pemerintahan militer di sebagian besar negara Afrika, benua ini dihadapkan pada beragam tantangan keamanan, seperti ketidakstabilan politik, konflik yang dipicu oleh kepentingan politik, dan tindakan kriminal. Tantangan ini mencakup kekerasan dalam pemilu, gerakan separatis, pemberontakan, militan, perampokan bersenjata, kejahatan lintas batas, konflik antara penggembala dan petani, serta berbagai tantangan keamanan lainnya yang mengancam perdamaian dan stabilitas di sebagian besar negara di benua ini.

Meskipun tantangan-tantangan tersebut sebagian besar bersifat internal, mereka cenderung meningkat dan menyebar ke negara-negara tetangga, sehingga menjadi ancaman serius bagi fungsi efektif negara-negara tersebut, serta potensi sosial-ekonomi dan kemakmuran negara-negara tersebut, dan pada akhirnya memengaruhi benua Afrika secara keseluruhan.

Hampir setiap bagian dari benua Afrika dilanda oleh wabah ketidakamanan yang dipicu oleh ketidakstabilan politik, baik yang disebabkan oleh negara maupun pihak-pihak yang menentang negara. Di kawasan Afrika Utara, ketidakstabilan politik yang dipicu oleh Arab Spring pada tahun 2010 menyebabkan instabilitas dan pergantian rezim di Tunisia dan Mesir, jatuhnya Libya pada tahun 2011, serta kemunculan terorisme internasional di Afrika Utara.

Kebangkitan terorisme dan konflik bersenjata di Libya semakin memperburuk pemberontakan yang sudah kompleks di Tanduk Afrika hingga ke kawasan sub-Sahel dan sub-Sahara. Selain itu, perang saudara di Sudan antara pasukan pemerintah dan kelompok oposisi yang telah menyebabkan banyak korban jiwa sejak tahun 2013, diikuti oleh pemisahan Sudan Selatan, serta kebuntuan politik yang berkepanjangan di negara tersebut, terus menghalangi segala bentuk pembangunan yang seharusnya dapat dicapai di kedua negara tersebut.

Di kawasan Afrika Timur, Kenya menghadapi ancaman terorisme yang dipicu oleh Al-

Shabaab dari negara tetangganya, Somalia, sementara konflik Eritrea-Ethiopia terus merusak stabilitas kawasan tersebut. Selain itu, meningkatnya otoritarianisme Presiden Yoweri Museveni dan lemahnya institusi di Uganda semakin memperburuk ketidakstabilan politik di negara itu (International Crisis Group, 2021).

Di kawasan Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo telah dilanda pergolakan politik dan konflik berkepanjangan yang disebut sebagai krisis paling terabaikan di dunia karena kebutuhan yang sangat besar, kurangnya pendanaan yang akut, serta minimnya perhatian media dan diplomatik (NRC, 2021). Selain itu, negara-negara seperti Kamerun, Chad, dan Republik Afrika Tengah sedang berjuang menghadapi masalah terorisme di berbagai wilayah mereka (Conflict Trends in Africa, 2021).

Demikian pula, kawasan Afrika Barat mengalami masalah yang sama terkait terorisme dan ketidakstabilan politik, khususnya di negara-negara seperti Nigeria dan Niger yang berbatasan dengan Chad dan Kamerun di wilayah Cekungan Danau Chad. Sejak tahun 2009, Nigeria dan Niger telah menghadapi serangan kelompok teroris Boko Haram, yang menimbulkan dampak parah pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat, termasuk pada jalannya pemerintahan yang efektif. Saat ini, seluruh wilayah Danau Chad telah berubah menjadi pusat aktivitas terorisme di kawasan tersebut. Selain itu, Mali dan Guinea juga mengalami ketidakstabilan politik yang serius.

Di kawasan Afrika Selatan, serangan xenofobia di Afrika Selatan telah memicu ketidakharmonisan sosial dan budaya yang merusak kerja sama serta solidaritas yang diperlukan untuk integrasi dan kolaborasi di benua tersebut. Mengingat tingkat konflik, ketidakamanan, dan ketidakstabilan politik yang dihadapi benua Afrika serta tantangan besar dalam mengelola situasi ini oleh kepemimpinan Uni Afrika (AU), menjadi jelas bahwa pelaksanaan Agenda 2063 AU, yang bertujuan untuk kemajuan ekonomi benua, tidak dapat tercapai tanpa perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut.

Data terbaru dari *Uppsala Conflict Program, Global Terrorism Database, United States Institute for Peace*, mengungkapkan bahwa antara tahun 1970 - 2020 banyak terjadi konflik bersenjata, pemberontakan, dan terorisme, di Afrika menjadi sangat tidak stabil sehingga menghambat kemampuannya untuk berkembang bagi benua Afrika dan sekitarnya (The Conversation, 2021; USIP, 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya berpendapat bahwa lingkungan yang tidak demokratis dan terpolarisasi secara sosial (Miguel, 2007), pengangguran di kalangan pemuda (Urdal, 2012; Azeng dan Yogo, 2013), serta kemiskinan dan penurunan pendapatan (Piazza dan Von Hippel, 2014) memicu kerusuhan sipil di negara-negara berkembang. Namun, literatur yang ada umumnya memperlakukan negara-negara berkembang sebagai satu kesatuan, tanpa memberikan perhatian khusus pada dinamika intra-regional di wilayah geografis tertentu seperti Sub-Sahara Afrika (SSA).

Fokus kontekstual semacam itu sangat diperlukan terkait dengan SSA, mengingat karakteristik ketidakstabilan politik yang sangat rapuh di sebagian besar negara Afrika, dengan meningkatnya insiden ketidakstabilan politik atau kekerasan yang sangat menonjol di kawasan ini (Fagbemi dan Asongu, 2021).

Tinjauan yang komprehensif terhadap faktor-faktor sosial ekonomi yang menjadi pendorong kerusuhan politik di SSA akan membantu para pembuat kebijakan (khususnya pemerintah) merumuskan kebijakan yang dirancang untuk menangani penyebab utama kerusuhan sipil daripada hanya menangani manifestasi luarnya saja.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai "**Pengaruh Konflik Internal dan Terorisme terhadap Stabilitas Keamanan di Kawasan Sub-Sahara Afrika**". Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana konflik internal dan terorisme yang terjadi di Afrika khususnya, di Kawasan Sub-

Sahara berdampak kepada stabilitas keamanan Kawasan. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas bagaimana dampak konflik internal dan terorisme pada stabilitas keamanan di Afrika Sub-Sahara.

## **KERANGKA ANALITIK**

Salah satu konsep penting dalam realisme adalah *“balancing behaviour”* yaitu tindakan negara-negara untuk menyeimbangkan kekuatan guna mencegah dominasi oleh satu aktor tertentu. Dalam studi mengenai pengaruh Rusia di Afrika, konsep ini digunakan untuk memahami bagaimana negara-negara di kawasan tersebut berupaya menyeimbangkan pengaruh kekuatan besar demi menjaga stabilitas regional.

Dengan demikian, teori realisme dan konsep-konsep terkaitnya memberikan kerangka analitis yang berguna untuk memahami dinamika stabilitas keamanan di Afrika Sub-Sahara, termasuk bagaimana negara-negara di kawasan tersebut berinteraksi dengan kekuatan eksternal dan aktor non-negara dalam upaya menjaga keamanan dan kepentingan nasional mereka.

### **Konsep Konflik Internal**

*Internationalization of Conflict Theory* berusaha menjelaskan bagaimana suatu konflik Internal bertransformasi menjadi sebuah konflik Internasional. Konflik Internal adalah konflik yang terjadi di dalam negara yang biasanya dilatarbelakangi oleh isu Suku, Ras, Etnis, dan agama. konflik Internal memiliki dimensi etnis yang sangat kuat. Dalam banyak fakta menyebutkan bahwa konflik bersenjata Internal lebih lazim terjadi daripada konflik antar negara. Biasanya konflik Internal terjadi karena adanya suatu kelompok yang lebih dominan yang kemudian membuat kelompok yang lain lebih rendah. Dalam situasi tersebut, pihak ataupun kelompok yang berada pada sistem bawahan ini akan berusaha menumbangkan kelompok yang dominan tersebut. Hal ini terjadi karena tidak adanya pembagian kekuasaan secara merata, hak-hak minoritas diabaikan, dan akses yang tidak merata terhadap sumber daya bagi masing-masing kelompok etnis (Lobell, 2004).

Konflik internal juga dipicu oleh kegagalan tata kelola pemerintahan serta melemahnya struktur negara. Situasi ini akan memicu kelompok-kelompok tertentu untuk menguasai negara, pemerintahan, dan sumber daya yang ada. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Saideman bahwa:

*“If the state cannot protect the interests of all ethnic groups, then each group will seek to control the state, decreasing the security of other groups and decreasing the ability of the state to provide security for any group”* (Stephen, 1996).

Konflik internasional merupakan konflik yang terjadi yang melintasi batas negara, yang melibatkan aktor-aktor internasional terutama negara. Herbert C. Kelman menyebutkan bahwa konflik internasional adalah upaya saling mempengaruhi antar negara dengan penggunaan kekuatan koersif. Hal ini dilakukan untuk mencapai dan melindungi kepentingan, dan mempengaruhi perilaku pihak lain. Ia menyebutkan bahwa Konflik internasional terjadi saat kepentingan antar pihak-pihak saling berbenturan, yaitu ketika pencapaian kepentingan salah satu pihak dianggap mengancam kepentingan pihak lain. Oleh karena itu, dalam mengejar konflik, para pihak terlibat dalam saling mempengaruhi, yang dirancang untuk memajukan posisi mereka sendiri dan untuk menghalangi pihak lawan (Herbert, 2004).

Dalam *Internationalization of Conflict Theory*, salah satu konsep yang mendasari suatu konflik bertransformasi menjadi konflik internasional adalah Eskalasi. Konsep ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan konflik, terutama dalam konteks konflik etnis. Hal ini terjadi ketika konflik yang sudah ada di suatu wilayah geografis berkembang menjadi konflik yang lebih luas atau melibatkan pihak-pihak asing dalam pertempuran.(Lobell, 2004). Eskalasi konflik terjadi di sebuah negara yang mengalami konflik, dan dengan adanya konflik tersebut pihak eksternal baik negara tetangga, maupun negara lain dengan kekuatan besar

melakukan intervensi dalam konflik tersebut (Wardhani, 2020). Eskalasi dapat terjadi melalui berbagai rute, termasuk melalui aliansi, irredensivitas, pengalihan perhatian, dan kelemahan internal. Dalam konteks konflik antarnegara, eskalasi juga dapat terjadi ketika aktor-aktor baru terlibat dalam konflik yang sudah ada di dalam batas-batas geografis yang terbatas. Ini menunjukkan bahwa eskalasi adalah proses di mana konflik berkembang dan melibatkan lebih banyak pihak atau wilayah. Proses eskalasi konflik terjadi ketika konflik asli berkembang dan melibatkan lebih banyak pihak atau wilayah, baik melalui interaksi langsung maupun tidak langsung yang berasal dari permusuhan yang sedang terjadi atau sebelumnya di daerah lain. eskalasi konflik merupakan proses yang kompleks, dipimpin oleh massa atau elit, dan dapat melibatkan pihak-pihak asing yang berperang, yang dapat memperburuk eskalasi konflik (Lobell, 2004).

Eskalasi melihat bahwa transformasi konflik Internal menjadi konflik Internasional biasanya terjadi pada negara yang memiliki ikatan etnis atau persamaan etnis ataupun ideologi. Umumnya terjadi pada etnis minoritas yang sedang berkonflik yang kemudian menggalang kekuatan ke etnis yang sama ke negara lain. Kelompok etnis luar akan bergabung dengan konflik etnis internal yang sedang berlangsung ketika mereka memiliki peluang. kelompok-kelompok etnis luar akan mengambil keuntungan dari celah-celah kerentanan. Dalam hal ini, kelompok etnis eksternal menganggap negara dengan konflik internal yang signifikan sebagai sasaran empuk. Dukungan eksternal juga dapat digunakan untuk memperpanjang konflik dan mengeringkan ekonomi musuhnya, sehingga melemahkannya dari dalam (Lobell, 2004).

### **Konsep Terorisme**

Terorisme adalah fenomena kompleks yang melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan politik, ideologis, atau religius dengan menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. Meskipun demikian, hingga kini belum ada definisi universal yang disepakati secara internasional mengenai terorisme.

Menurut hukum Indonesia, Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menciptakan suasana yang sangat menakutkan bagi masyarakat sekitar, dan jugadapat menimbulkan korban jiwa dalam jumlah yang cukup besar dan juga dapat menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap benda-benda penting, lingkungan, dan fasilitas yang memiliki kepentingan strategis atau fasilitas internasional yang motifnya adalah ideologis, politik atau keamanan. Standar dan pemahaman yang jelas tentang apa yang disebut terorisme belum disatukan sampai sekarang. Sulit untuk membangun pemahaman yang diterima secara universal tentang hal yang sama, dan dengan demikian sulit untuk mengontrol makna terorisme. Perbedaan definisi terorisme diberikan karena masing-masing yang pihak berkepentingan untuk menerjemahkan penggunaan istilah terorisme ke dalam pandangan moderasinya. Selain itu, karena ada banyak elemen terkait. Tidak mudah mendefinisikan terorisme, seperti yang terlihat dari upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Upaya menemukan definisi hukum universal tentang terorisme masih menjadi agenda yang belum selesai di PBB. Dengan demikian, tidak ada definisi hukum yang diterima secara universal tentang terorisme. Kesulitan dalam mencapai konsensus tentang definisi istilah ini lebih bersifat politis daripada teknis. Peradilan pidana internasional bukanlah “perusahaan yang berorientasi pada instrumen teknis”, melainkan secara padat terlibat dalam politik internasional.

Definisi objektif terorisme disebabkan oleh fakta bahwa: (i) Terorisme memiliki bentuk yang berbeda; meskipun biasanya disamakan dengan subversi politik, kadang-kadang digunakan oleh pemerintah, dan digunakan sebagai instrumen kejahatan sindikasi. (ii) Kriteria untuk mendefinisikan “terorisme” pada umumnya bersifat subjektif karena sebagian besar didasarkan pada pertimbangan politik. (iii) Diatas segalanya, terorisme didorong oleh berbagai motif tergantung pada waktu dan ideologi yang berlaku.

Dalam hukum internasional, terorisme diakui sebagai ancaman serius terhadap perdamaian

dan keamanan global. Berbagai konvensi internasional telah diadopsi untuk menangani aspek-aspek spesifik dari terorisme. Memahami konsep terorisme dari berbagai perspektif, termasuk hukum internasional dan faktor-faktor penyebabnya, sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk mencegah dan menanggulangi ancaman ini.

### **Konsep Stabilitas Keamanan Kawasan**

Dalam studi hubungan internasional, konsep keamanan kawasan menjadi fokus penting dalam memahami bagaimana negara-negara berinteraksi untuk menjaga stabilitas regional. Keamanan Regional adalah kondisi dimana sebuah kawasan memiliki rasa takut dengan dipersepsikan oleh negara-negara di suatu kawasan tertentu yang keberadaannya merasa terancam (Yani. Dkk, 2017). Menurut Mearsheimer untuk merespon ancaman setiap negara berada dalam security dilemma. Ketika ancaman eksternal relatif rendah, maka suatu negara perlu membangun kekuatan militer dalam artian tidak terlalu besar, kekuatan militer yang dibangun hanya untuk memelihara kedaulatan yang menciptakan balance of power. Kemudian sebaliknya, jika negara merasa menghadapi ancaman eksternal yang besar, maka negara tersebut dipastikan akan membangun akuisisi militer yang besar pula untuk menambah kedaulatan dengan mencapai status regional hegemony (Hadiwinata, 2017).

Dalam konteks Hubungan Internasional, regional memiliki sifat berhubungan antar negara atau berkelompok negara-negara yang memiliki kesamaan atau kedekatan. Kelompok negara-negara tersebut berlangsung dalam kerangka orientasi politik, kesamaan dan kedekatan geografis, kondisi perekonomian, ideologi dan aliansi, serta mobilitas antar negara. Maka dari itu, keamanan regional akan mempengaruhi semua aktor didalamnya karena berkaitan dengan aktor-aktor (negara) yang berada dalam kawasan karena dari keamanan regional akan menentukan kondisi keamanan nasional hingga global (Yani. Dkk, 2017).

Keamanan regional dimaksudkan dalam konsep memahami keamanan internasional pada ranah analisis dalam subsistem regional. Konsep ini penting dalam sebuah fakta pada tingkat otonomi yang yang besar dari hubungan keamanan regional. Subsistem regional dapat dianalisis pada konteks sistematis dan tingkat negara. Menurut Barry Buzan keamanan pada dasarnya adalah fenomena hubungan. Ketergantungan negara-negara di kawasan terkait keamanan dapat dipahami melalui pola-pola hubungan antar negara kawasan. Buzan menawarkan konsep dalam keamanan regional dengan menyebutnya sebagai fenomena security complex.

#### **1. Teori Kompleks Keamanan Kawasan (Regional Security Complex Theory - RSCT)**

Dikemukakan oleh Barry Buzan dan Ole Wæver, teori ini menekankan bahwa keamanan negara-negara lebih dipengaruhi oleh dinamika regional daripada interaksi global. Menurut RSCT, kawasan dengan interdependensi keamanan yang tinggi membentuk kompleks keamanan, di mana ancaman dan kekhawatiran keamanan saling terkait.

#### **2. Pendekatan Sekuritisasi (Securitization Approach)**

Pendekatan ini, yang juga dikembangkan oleh Buzan dan Wæver, menekankan bahwa isu menjadi masalah keamanan ketika aktor politik menyatakannya sebagai ancaman eksistensial. Proses ini disebut "sekuritisasi" dan dapat diterapkan pada berbagai isu, termasuk yang bersifat regional.

### **METODE PENELITIAN**

Untuk melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai alat bantu. Penelitian ini disusun berdasarkan data deskriptif yang menggambarkan "Pengaruh Konflik Internal dan Terorisme". Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian yang memerlukan penyelidikan variabel dan mempelajari fenomena secara lebih mendalam untuk memahami pertanyaan penelitian. Dalam hal ini penelitian yang menggunakan metode kualitatif memusatkan perhatian pada fenomena atau proses permasalahan yang diteliti, dan hasilnya memuat makna-makna yang muncul dari

eksplorasi peneliti dalam proses tersebut. (Cresswell, 2011)

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif mempunyai ciri-ciri tertentu. Salah satu cirinya adalah penelitian yang dilakukan memungkinkan kita mengkaji permasalahan dan mengembangkan fenomena inti permasalahan. Tinjauan literatur dan penelitian berfungsi untuk mendukung topik yang sedang diselidiki. Penelitian diawali dengan rumusan masalah secara umum, yang didasarkan pada pengalaman terhadap objek yang diteliti. Memperoleh data dari kata-kata dan ucapan verbal pihak-pihak

tertentu, dan menggunakan analisis dan interpretasi makna yang diambil dari fenomena untuk menganalisis dan menjelaskan secara fleksibel dan terstruktur sesuai dengan kriteria evaluasi yang mencakup reflektivitas dan bias subjektif. (Sugiyono, 2014) Berdasarkan definisi dan karakteristik tersebut, maka metode yang digunakan untuk menyelidiki penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif. Alasan pemilihan peneliti karena penelitian akan menghasilkan data atau informasi deskriptif tertulis dari para ahli/informan terkait dengan topik yang dibahas. Peneliti juga bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang sudah berlangsung lama dan menemukan perspektif baru terhadap pertanyaan yang diajukan.

## **PEMBAHASAN**

### **Konflik Internal di Kawasan Sub-Sahara Afrika**

Perang bersenjata dalam konteks konflik intra-negara merujuk pada konflik yang terjadi di dalam suatu negara (*conflict within states*). Menurut Russet dkk. (2010:208-209), konflik internal dalam suatu negara berfokus pada dua aspek utama. Pertama, konflik ini bersifat destruktif dan berlangsung dalam jangka waktu lama, melibatkan berbagai kelompok masyarakat, merusak infrastruktur sipil, serta berkontribusi terhadap kemiskinan dan keterbelakangan.

Kedua, terdapat konflik antar negara (*conflict between states*), yang meskipun memiliki dampak serupa dengan konflik domestik, sering kali dianggap kurang relevan dan sulit dipahami bahwa konflik antar negara juga dapat memicu konflik internal. Dalam sejarahnya, konflik semacam ini sulit untuk diselesaikan dan sering kali menyebabkan perang internal (internal war) di dalam suatu negara. Akibatnya, negara yang mengalami konflik berkepanjangan berisiko menjadi negara gagal, di mana pemerintahnya tidak mampu menjamin keamanan bagi warganya dan kehilangan kapasitas untuk berfungsi sebagai negara berdaulat (*sovereign state*).

Terdapat beberapa faktor yang memicu konflik intra-negara yang pada akhirnya berkembang menjadi perang internal (internal war), sehingga menghambat terwujudnya perdamaian. Internal war dapat diartikan sebagai konflik bersenjata (armed conflict) yang melibatkan berbagai aktor politik atau kelompok masyarakat dalam upaya merebut kendali atas pemerintahan yang berdaulat di suatu negara.

Menurut Wardoyo (2015), terdapat dua kategori utama penyebab konflik, yaitu kondisi objektif dan kondisi subjektif. Kondisi objektif mencakup faktor-faktor seperti kepentingan nasional, sengketa teritorial, kedaulatan negara, serta perebutan sumber daya ekonomi dan pembangunan. Hambatan dalam mencapai perdamaian sering kali terkait dengan isu-isu kebijakan atau kepentingan negara dalam dinamika hubungan internasional. Dengan asumsi bahwa setiap tindakan negara didasarkan pada pertimbangan rasional, faktor-faktor yang memicu konflik akibat upaya negara dalam memenuhi kepentingannya dapat dikategorikan sebagai kondisi objektif.

Sementara itu, kondisi subjektif meliputi keinginan untuk memperoleh pengakuan atas identitas, faktor etnisitas, perlindungan budaya, serta persoalan representasi politik. Jika kondisi objektif lebih berorientasi pada kepentingan negara, maka kondisi subjektif lebih menyoroti penyebab konflik yang berakar pada dinamika kelompok masyarakat atau

komunitas tertentu.

Kondisi objektif dan subjektif yang memicu konflik internal, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, juga dikaitkan dengan kemunculan konflik internal menurut Sheehan (2011:225). Sheehan menjelaskan bahwa faktor utama yang sering menjadi penyebab konflik internal adalah kemiskinan dan ketimpangan dalam pembangunan. Berbagai aspek keamanan, seperti tingkat kemiskinan, stabilitas, pembangunan, dan perdamaian, sering kali saling berkaitan dan berkontribusi terhadap meningkatnya ketidakamanan (*insecurity*) dalam suatu negara.

Studi ini membatasi unit analisis pada kawasan Afrika Sub-Sahara karena wilayah ini merupakan kasus unik dalam diskusi mengenai kegagalan negara dan kekerasan politik. Kegagalan negara menjadi fenomena yang meluas di kawasan ini. Dengan pengecualian Sahara Barat dan Swaziland, sebanyak 52 dari 54 negara di Afrika masuk dalam Indeks Negara Gagal (*Failed State Index*) tahun 2009 sebagai negara yang berada pada tingkat peringatan atau siaga kritis. Penulis berpendapat bahwa kegagalan negara tetap menjadi masalah utama di Afrika Sub-Sahara karena wilayah ini tidak pernah terorganisir berdasarkan model negara kontemporer yang dikenal saat ini. Akibatnya, negara-negara di kawasan ini harus berjuang untuk membangun institusi politik dan ekonomi yang mampu menopang keberlangsungan sebuah negara yang berfungsi secara efektif.

Penelitian yang berfokus pada pemahaman mengenai negara-negara pascakolonial di Afrika mengakui bahwa banyak ilmuwan politik berupaya menerapkan konsep kenegaraan berdasarkan model Weber, yang sebenarnya kurang sesuai dengan konteks identitas etnis dan suku yang khas di negara-negara pascakolonial Afrika (Jackson dan Rosberg, 1982; Bates, 1981; Widner, 1995; Herbst, 1996).

Afrika tidak pernah terdiri dari negara-negara berdaulat dalam pengertian klasik yang memiliki monopoli atas wilayahnya secara penuh. Selain itu, banyak kekuatan kolonial yang hadir di Afrika tidak berusaha memperluas otoritas administratif pemerintah mereka di luar ibu kota. Seperti yang dikemukakan oleh Jackson dan James (1993, 139), "Dalam banyak kasus, pemerintahan kolonial tidak lebih dari birokrasi dasar dengan jumlah personel dan sumber daya keuangan yang terbatas, serta lebih menyerupai sistem feodalisme pedesaan di Eropa dibandingkan dengan negara merdeka modern." Setelah memperoleh kemerdekaan, beberapa negara Afrika melanjutkan pola ini dan tidak berupaya secara signifikan untuk memperluas otoritas administratif pemerintah mereka ke luar pusat-pusat perkotaan.

Berdasarkan latar belakang historis Afrika, Herbst (1996) berpendapat bahwa kegagalan dalam memulihkan negara yang gagal atau mencegah negara yang lemah dari kehancuran di Afrika disebabkan oleh legitimasi dan pengakuan sistem internasional terhadap beberapa negara Afrika yang sebenarnya tidak pernah benar-benar menjadi negara sejak awal.

Sebagian besar laporan dan studi analitis tentang negara masih menggunakan konsep negara-bangsa yang ada sebagai unit analisisnya. Namun, batas-batas wilayah yang dibuat oleh kekuatan kolonial menjadikan konsep kenegaraan di Afrika sulit untuk diwujudkan. Karena Afrika pascakolonial tidak memiliki sejarah panjang dalam perkembangan negara, maka sulit bagi negara-negara di kawasan ini untuk membangun negara yang kuat.

Banyak negara Afrika pascakolonial mengalami kegagalan negara karena mereka tidak memiliki model atau cetak biru yang dapat dijadikan acuan. Akibatnya, negara-negara yang tidak memiliki sejarah perkembangan negara sebelumnya mengalami kesulitan dalam membangun negara yang kuat dan efektif saat ini, karena institusi politik dan ekonomi yang diperlukan untuk mendorong pembangunan negara tidak pernah dikembangkan di masa lalu.

Maka dari itu, Konflik di Sub-Sahara Afrika seringkali dipicu oleh perebutan sumber daya alam, ketidakpuasan terhadap pemerintahan, ketegangan etnis dan agama, serta warisan kolonialisme yang menyebabkan perbatasan buatan yang tidak adil.

### Terorisme di Kawasan Sub-Sahara Afrika

Terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan (Muchamad Ali Syafa'at, 2003:45). Menurut Muladi (2002:22) terorisme dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap hati nurani (*crimes against conscience*). Hal ini karena kejahatan terorisme bukan kejahatan akibat melanggar Undang-Undang, melainkan karena pada dasarnya tergolong sebagai natural wrong atau acts wrong in themselves. Menurut Paul Wilkinson (2001:44), pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. Dalam aksinya tindakan teror biasanya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Pelaku teror dimotivasi oleh ideologi yang keras.
- b. Pelaku melakukan intimidasi yang memaksa.
- c. Melakukan pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk tujuan tertentu.
- d. Target teror dipilih, sekalipun dalam menentukan target dilakukan secara rahasia namun tujuan pelaksanaannya adalah untuk mendapat publisitas.
- e. Korban bukan tujuan melainkan sarana untuk menciptakan ketakutan bagi banyak orang.
- f. Walau eksplisit namun pesan dari teror cukup jelas.

Terorisme telah menjadi musuh bersama baik bagi bangsa Indonesia maupun masyarakat seluruh dunia. Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk gerakan yang terorganisasi. Dewasa ini terorisme telah mempunyai jaringan yang luas dan teroganisir secara global dan mengancam perdamaian dan keamanan nasional. Tindakan teror dari terorisme dapat berakibat fisik dan/atau non fisik (psikis). Tindakan teror fisik biasanya berakibat pada fisik korban seperti pemukulan, penyendaraan, pembunuhan, peledakan bom dan sebagainya sementara akibat dari non fisik (psikis) bisa dilakukan dengan penyebaran isu, ancaman, dan sebagainya. Akibat tindakan teror ini setiap orang atau kelompok orang yang menjadi korban teror menjadi merasa tidak aman dan dalam kondisi rasa takut (traumatis).

Bahkan dapat berakibat lebih luas yaitu dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi, politik dan kedaulatan negara. Oleh sebab itu, tindakan terorisme harus mendapat solusi baik dalam pencegahan maupun penanggulangannya dari pemerintah maupun masyarakat (Mudzakkir, 2008:6-7).

Adapun karakteristik terorisme dalam bukunya (Abdul Wahid, dkk., 2004:29-30) yang dikutip, menurut Loudewijk F. Paulus, ada 4 (empat) tipe karakteristik terorisme yaitu:

- a. Terorisme dalam karakteristik organisasi bahwa terorisme adalah sebuah organisasi, yang melakukan rekrutmen, memiliki pendanaan dan memiliki jaringan secara global.
- b. Terorisme dalam karakteristik operasi bahwa terorisme memiliki perencanaan, taktik dan waktu.
- c. Terorisme dalam karakteristik perilaku bahwa terorisme melakukan motivasi, dedikasi, disiplin, maupun keinginan untuk membunuh atau keinginan untuk menyerah hidup-hidup;
- d. Terorisme dalam karakteristik sumber daya bahwa terorisme melakukan latihan, mengembangkan kemampuan, ahli dalam pengalaman terkait bidang teknologi, persenjataan, maupun perlengkapan dan transportasi.

Sementara itu, menurut James H. Wolfe (1990) beberapa karakteristik terorisme adalah sebagai berikut:

- 1) Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun nonpolitis;
- 2) Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil yaitu fasilitas umum warga maupun sasaran non-sipil fasilitas militer atau kamp militer



Pasukan keamanan telah mundur ke benteng-benteng terpencil, meninggalkan kendali wilayah tersebut kepada geng-geng kriminal dan panglima perang Somalia.

Di daerah miskin Nairobi, kekuasaan secara de facto berada di tangan milisi yang dijalankan oleh sekte-sekte agama dan pemimpin etnis. Berbekal persediaan senjata dari Somalia, mereka melakukan perampokan bersenjata. Beberapa petugas kepolisian bahkan menyewakan senjata dan kendaraan kepada kelompok kriminal serta sesekali turut serta dalam aksi perampokan. Pendapatan dari aktivitas kriminal tidak hanya memastikan kelangsungan hidup mereka secara fisik tetapi juga memberikan harapan untuk peningkatan status sosial.

Dalam kondisi seperti ini, pasukan keamanan Kenya tidak akan mampu mencegah serangan di Mombasa, bahkan jika pemerintah memiliki informasi yang cukup mengenai ancaman tersebut dan menganggap situasi itu dengan serius. Saat ini, pemerintah tidak mampu mengendalikan perdagangan barang dan pergerakan orang di perbatasan Somalia-Kenya, bahkan jika mereka memiliki tekad untuk melakukannya.

Ketidakmampuan sebagian besar pasukan keamanan di Afrika untuk melindungi target yang terancam oleh terorisme sangat kontras dengan banyaknya potensi target serangan, termasuk kedutaan besar, berbagai lembaga dan proyek organisasi pembangunan internasional, anak perusahaan perusahaan Amerika dan Eropa, serta hotel-hotel wisata internasional. Kedutaan besar AS dan kantor organisasi pembangunan USAID kini menyerupai benteng "Wild West" abad ke-19.

Perusahaan minyak dan pertambangan telah beralih menggunakan layanan keamanan paramiliter swasta untuk melindungi aset mereka. Warga Amerika, Eropa, dan Afrika yang memiliki kemampuan finansial semakin banyak yang tinggal di komunitas tertutup (gated communities) yang dijaga ketat dan memiliki sistem perlindungan yang canggih.

Namun, tidak semua lokasi yang terancam dapat dilindungi secara efisien dengan penghalang keamanan. Hal ini terutama berlaku untuk institusi yang terisolasi secara geografis, yang biaya perlingkungannya terlalu tinggi. Contohnya termasuk proyek pembangunan di daerah terpencil serta hotel-hotel wisata yang terletak di taman nasional.

Meskipun Afrika Sub-Sahara menunjukkan banyak faktor yang sebelumnya berkontribusi terhadap munculnya terorisme internasional di Timur Tengah dan Asia Tengah, kemungkinan munculnya bentuk terorisme internasional yang benar-benar khas Afrika dalam waktu dekat masih kecil. Ancaman teroris utama di Afrika lebih disebabkan oleh ketidakmampuan negara-negara di kawasan ini dalam mengontrol wilayahnya dan melindungi target potensial dari serangan teroris.

Afrika tidak akan mampu memenangkan perang melawan terorisme tanpa investasi yang kuat dalam pembangunan kapasitas negara, terutama di sektor keamanan, dengan dukungan dari mitra Amerika dan Eropa. Namun, bantuan semacam ini berisiko disalahgunakan untuk melemahkan proses liberalisasi politik dan demokratisasi di Afrika. Jika hal itu terjadi, maka justru dapat memperkuat faktor-faktor politik yang sebelumnya berkontribusi terhadap munculnya terorisme internasional di wilayah lain. Oleh karena itu, kewaspadaan dan pendekatan yang terukur sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko tersebut.

### **Hubungan Antara Konflik Internal dan Terorisme**

Konflik internal dan terorisme sering kali memiliki keterkaitan yang erat, terutama di wilayah yang mengalami ketidakstabilan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam banyak kasus, konflik internal menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kelompok teroris untuk tumbuh dan berkembang. Hubungan antara keduanya dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:

#### **1. Konflik Internal Sebagai Pemicu Terorisme**

Ketika suatu negara mengalami konflik internal, seperti perang saudara atau

pemberontakan bersenjata, kondisi yang tidak stabil sering kali memberikan peluang bagi kelompok teroris untuk berkembang. Faktor-faktor yang berkontribusi meliputi:

- a. **Kekosongan Kekuasaan:** Pemerintah yang lemah atau kehilangan kendali atas wilayah tertentu memberi ruang bagi kelompok teroris untuk beroperasi. Contohnya, di Libya pasca-2011, konflik internal menyebabkan munculnya kelompok teroris seperti ISIS.
- b. **Radikalisasi Masyarakat:** Konflik berkepanjangan sering kali menyebabkan ketidakpuasan dan meningkatkan kemungkinan kelompok tertentu untuk bergabung dengan organisasi teroris sebagai sarana perlawanan.
- c. **Perekrutan dari Kelompok Pemberontak:** Beberapa kelompok pemberontak dalam konflik internal mulai mengadopsi taktik teroris untuk mencapai tujuan mereka. Misalnya, Boko Haram di Nigeria awalnya merupakan kelompok pemberontak sebelum berkembang menjadi organisasi teroris global.

## 2. Terorisme Memperburuk Konflik Internal

Sebaliknya, kehadiran kelompok teroris dalam suatu negara yang mengalami konflik internal dapat memperburuk situasi dengan beberapa cara:

- a. **Meningkatkan Kekerasan dan Destabilisasi:** Taktik teroris seperti pemboman, penculikan, dan serangan terhadap warga sipil meningkatkan tingkat kekacauan dalam konflik yang sudah ada.
- b. **Memperpanjang Konflik:** Kelompok teroris sering kali mendapatkan sumber daya dari kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba atau penyelundupan senjata, yang dapat digunakan untuk mendanai kelompok pemberontak dan memperpanjang konflik internal.
- c. **Melemahkan Upaya Perdamaian:** Ketika kelompok teroris beroperasi dalam wilayah konflik, negosiasi damai menjadi lebih sulit karena pemerintah harus berhadapan dengan berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda.

## 3. Contoh Hubungan Konflik Internal dan Terorisme di Sub-Sahara Afrika

- a. **Somalia:** Konflik internal yang berlangsung selama puluhan tahun telah menciptakan lingkungan yang memungkinkan Al-Shabaab tumbuh dan menjadi ancaman besar di wilayah tersebut.
- b. **Nigeria:** Boko Haram berkembang dari gerakan radikal lokal menjadi kelompok teroris besar akibat ketidakpuasan sosial dan konflik antara pemerintah dan kelompok etnis tertentu.
- c. **Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger):** Kelompok teroris seperti Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM) memanfaatkan ketidakstabilan di wilayah ini untuk memperkuat pengaruhnya dan merekrut anggota dari komunitas yang terpinggirkan.

Konflik internal dan terorisme saling berkaitan dalam siklus yang berulang, di mana konflik menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan terorisme, sementara terorisme memperburuk dan memperpanjang konflik. Oleh karena itu, strategi penanggulangan harus mencakup pendekatan komprehensif yang menangani akar permasalahan ketidakstabilan dan memperkuat ketahanan negara terhadap ancaman tersebut.

### Pembahasan

#### Pengaruh Konflik Internal dan Terorisme terhadap Stabilitas Keamanan di Kawasan Sub-Sahara Afrika

Afrika Sub-Sahara merupakan salah satu kawasan dengan tingkat konflik internal dan aktivitas terorisme yang tinggi, yang berdampak signifikan terhadap stabilitas keamanan regional. Konflik internal sering kali dipicu oleh perselisihan etnis, perebutan sumber daya alam, ketimpangan sosial-ekonomi, serta kelemahan institusi negara. Sementara itu, kelompok

teroris seperti Boko Haram, Al-Shabaab, dan afiliasi ISIS memanfaatkan kondisi ketidakstabilan untuk memperluas pengaruh mereka. Afrika Sub-Sahara menghadapi ancaman proliferasi senjata ilegal dari berbagai sumber dan jalur. Salah satu sumber ancaman ini adalah kelebihan senjata yang berasal dari konflik masa lalu, seperti perang saudara atau konflik regional. Banyak pihak, termasuk kelompok bersenjata non-negara, organisasi kriminal, dan individu, sering membeli senjata ini di pasar gelap.

Perdagangan senjata ilegal menjadi sumber lain yang memfasilitasi transfer senjata melintasi perbatasan melalui penyelundupan. Pejabat korup, perbatasan yang lemah, dan penegakan hukum yang tidak efektif semakin memperburuk perdagangan ilegal ini. Selain itu, pencurian persediaan militer dan kepolisian, atau penyalahgunaan senjata yang diperoleh secara sah, juga dapat menyebabkan akuisisi senjata oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Jalur yang digunakan untuk memperoleh senjata ilegal beragam, tetapi sering kali melibatkan negara-negara tetangga dengan perbatasan yang lemah. Oleh karena itu, individu dan kelompok menggunakan berbagai jalur untuk mentransfer senjata dari satu negara ke negara lain, sehingga asal dan tujuan pengiriman sering kali tidak jelas. Beberapa jalur utama dalam perdagangan senjata ilegal di Afrika Sub-Sahara termasuk wilayah Sahel, Tanduk Afrika, dan kawasan Danau Besar (Conflict Armament Research, 2016).

Proliferasi senjata di Afrika Sub-Sahara terus memberikan dampak signifikan terhadap keamanan di kawasan tersebut. Ketersediaan senjata memperburuk konflik yang sedang berlangsung dan memperparah ketegangan yang sudah ada. Hal ini menyebabkan peningkatan kekerasan, korban jiwa, serta pengungsian massal (World Bank, 2011). Selain itu, mencapai perdamaian dan stabilitas menjadi sangat sulit, karena keberadaan senjata mempersulit upaya menghentikan kekerasan yang terus berlanjut serta aktivitas kriminal yang dilakukan oleh kelompok bersenjata (Human Rights Watch, 2012).

Di kawasan ini, proliferasi senjata juga menghambat upaya pembangunan. Sumber daya dialihkan untuk konflik dan langkah-langkah keamanan, sehingga anggaran untuk layanan sosial, pengembangan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi menjadi berkurang. Situasi ini memperburuk siklus kemiskinan dan keterbelakangan (United Nations Development Programme, 2017). Selain itu, senjata ilegal membahayakan warga sipil karena memberikan peluang bagi organisasi kriminal untuk melemahkan otoritas dalam menegakkan hukum, sehingga meningkatkan tingkat kejahatan seperti perampokan bersenjata, penculikan, dan perdagangan manusia. Perdagangan senjata ilegal juga memfasilitasi perekrutan dan aktivitas kelompok teroris, yang semakin memperburuk ketidakstabilan di kawasan tersebut. Senjata ilegal menjadi elemen utama dalam aksi terorisme dan perampokan bersenjata di Afrika Sub-Sahara. Sebagian besar kelompok teroris, seperti Boko Haram di Nigeria dan Al-Shabaab di Somalia, sangat bergantung pada persediaan senjata untuk menjalankan operasi mereka.

Sebagian besar kelompok teroris memperoleh senjata di pasar gelap atau melalui jalur penyelundupan (Conflict Armament Research, 2018). Kejahatan bersenjata juga difasilitasi oleh ketersediaan senjata api, yang dilakukan oleh organisasi kriminal bersenjata. Kelompok kriminal melakukan kejahatan seperti pemerasan, perampokan bersenjata, dan pencurian ternak. Dengan akses mudah terhadap senjata ilegal, mereka dapat menjalankan aktivitas ini dengan lebih leluasa, yang pada akhirnya mengancam keselamatan komunitas serta mata pencaharian masyarakat (African Union, 2019).

Menurut Titus dan Ijuplil (2022), pemberontakan Boko Haram di timur laut Nigeria semakin memburuk. Ketidakamanan pangan yang parah mempengaruhi sekitar lima juta orang di wilayah tersebut (8,5 juta di seluruh cekungan Danau Chad). Mereka menambahkan bahwa sejak 2009, kawasan timur laut mengalami kemunduran kemanusiaan akibat operasi kekerasan yang terus berkembang dari Boko Haram. Pemberontakan Boko Haram, yang semakin intensif

dan menciptakan krisis kemanusiaan yang serius di timur laut Nigeria, telah mengacaukan kehidupan serta sumber penghidupan jutaan orang. Mereka merekomendasikan agar pemerintah Nigeria dan organisasi intervensi asing bertindak cepat untuk menghancurkan Boko Haram guna memungkinkan masyarakat di timur laut Nigeria mengejar kepentingan ekonomi mereka tanpa takut akan ancaman atau pembalasan.

Di Afrika Sub-Sahara, pemerintahan yang lemah dan korupsi menjadi faktor utama yang memfasilitasi proliferasi senjata. Pasukan keamanan dan lembaga pengawasan perbatasan menjadi target yang mudah bagi praktik korupsi, yang memungkinkan penyimpangan senjata yang diperoleh secara legal serta perdagangan senjata ilegal. Para pejabat yang korup sering kali berpaling atau bahkan terlibat dalam kegiatan penyelundupan demi kepentingan pribadi.

Pemerintahan yang lemah, yang ditandai dengan institusi yang tidak efektif, kurangnya akuntabilitas, serta hukum yang tidak diterapkan secara luas, sangat rentan terhadap proliferasi senjata. Tidak adanya kerangka regulasi yang efektif dan lemahnya mekanisme penegakan hukum menciptakan lingkungan yang memungkinkan arus senjata ilegal mengalir dengan mudah melintasi perbatasan dan jatuh ke tangan aktor non-negara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pelucutan Senjata (United Nations Office for Disarmament Affairs, 2019) menegaskan hal ini.

Studi ini menegaskan bahwa terdapat hubungan yang erat antara terorisme dan konflik internal, di mana keduanya sering kali saling memperkuat. Kelompok teroris dan pelaku kriminal sering kali bergantung pada penyebaran persenjataan serta perbatasan yang lemah untuk menjalankan aksi mereka. Terorisme dan konflik internal menimbulkan risiko serius bagi keamanan nasional maupun internasional. Tindakan-tindakan ini mengancam stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan kohesi sosial, selain juga menyebabkan kematian serta kerusakan properti.

Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini sangat penting untuk menjaga stabilitas dan perdamaian. Selain itu, studi ini juga menyoroti berbagai faktor yang berkontribusi terhadap penyebaran senjata dan terorisme. Faktor-faktor tersebut mencakup perang regional, fanatisme agama, keluhan politik, serta ketidakadilan sosial-ekonomi. Untuk merumuskan kebijakan dan intervensi yang efektif, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai isu-isu mendasar ini.

## **Faktor Penyebab dan Dampak Konflik Internal serta Terorisme terhadap Stabilitas Keamanan di Afrika Sub-Sahara**

Afrika Sub-Sahara telah lama menjadi kawasan yang rentan terhadap konflik internal dan aksi terorisme. Ketidakstabilan politik, ketidaksetaraan ekonomi, serta lemahnya institusi negara menjadi faktor utama yang memicu konflik berkepanjangan dan menjadikan kawasan ini sebagai salah satu wilayah paling rawan di dunia. Konflik internal dan terorisme saling berkaitan, memperburuk kondisi sosial, ekonomi, dan politik, sehingga menghambat pembangunan serta menciptakan ketidakamanan yang berkepanjangan.

### **Faktor Penyebab Konflik Internal dan Terorisme di Afrika Sub-Sahara**

#### **1. Sejarah Kolonialisme dan Perbatasan Buatan**

Banyak negara di Afrika Sub-Sahara mengalami permasalahan perbatasan yang diwariskan dari era kolonial. Perbatasan yang dibuat tanpa mempertimbangkan etnis dan budaya setempat menyebabkan kelompok-kelompok yang berbeda dipaksa hidup dalam satu negara, sering kali tanpa kohesi sosial yang kuat. Hal ini menciptakan ketegangan etnis dan sektarian yang mudah meledak menjadi konflik.

#### **2. Pemerintahan yang Lemah dan Korupsi**

Banyak negara di kawasan ini memiliki pemerintahan yang lemah, dengan institusi

negara yang tidak mampu menegakkan hukum atau memberikan layanan dasar bagi masyarakatnya. Korupsi yang merajalela semakin memperparah keadaan, di mana dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan keamanan justru disalahgunakan oleh elit politik.

### 3. **Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial-Ekonomi**

Afrika Sub-Sahara memiliki tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya menciptakan rasa frustrasi di antara masyarakat miskin, yang kemudian dieksploitasi oleh kelompok bersenjata dan teroris untuk merekrut anggota baru. Ketika masyarakat merasa tidak memiliki peluang ekonomi yang cukup, mereka lebih mudah terpengaruh untuk bergabung dengan kelompok pemberontak atau ekstremis.

### 4. **Kelompok Ekstremis dan Ideologi Radikal**

Organisasi teroris seperti Boko Haram di Nigeria dan Al-Shabaab di Somalia menggunakan ideologi radikal untuk mempengaruhi dan merekrut anggota baru. Mereka sering memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah untuk membangun dukungan dan memperoleh sumber daya, baik dari dalam maupun luar negeri.

### 5. **Proliferasi Senjata Ilegal**

Penyebaran senjata ilegal di Afrika Sub-Sahara memperburuk konflik. Senjata-senjata ini sering kali berasal dari stok perang lama atau diperdagangkan di pasar gelap. Kelompok bersenjata dan teroris dapat dengan mudah memperoleh senjata untuk melancarkan serangan terhadap pemerintah atau warga sipil.

### 6. **Ketidakstabilan Politik dan Kepemimpinan yang Buruk**

Banyak negara di Afrika Sub-Sahara mengalami krisis politik yang berkepanjangan akibat pemimpin yang tidak demokratis dan enggan melepaskan kekuasaan. Pemilu yang tidak adil dan pemerintahan otoriter sering kali memicu ketidakpuasan yang berujung pada pemberontakan dan konflik sipil.

### 7. **Eksplorasi Sumber Daya Alam**

Kekayaan sumber daya alam seperti minyak, emas, dan berlian sering kali menjadi sumber konflik. Kelompok pemberontak dan teroris sering membiayai operasi mereka dengan mengeksploitasi sumber daya ini secara ilegal. Contohnya, perdagangan berlian ilegal di Sierra Leone yang menjadi sumber pendanaan bagi kelompok bersenjata selama perang saudara.

## **Dampak Konflik Internal dan Terorisme terhadap Stabilitas Keamanan di Afrika Sub-Sahara**

### 1. **Ketidakamanan dan Ketidakstabilan Politik**

Konflik internal dan terorisme menciptakan kondisi politik yang tidak stabil. Pemerintahan yang lemah dan sering kali tidak dapat mengendalikan seluruh wilayah negara mereka memungkinkan kelompok pemberontak dan teroris untuk menguasai daerah-daerah tertentu, menciptakan zona tanpa hukum.

### 2. **Krisis Kemanusiaan dan Pengungsi**

Perang saudara dan serangan teroris menyebabkan jutaan orang mengungsi dari rumah mereka. Menurut laporan PBB, konflik di negara-negara seperti Nigeria, Sudan Selatan, dan Republik Afrika Tengah telah menyebabkan krisis pengungsi terbesar di dunia. Para pengungsi sering kali hidup dalam kondisi yang buruk di kamp-kamp pengungsi, tanpa akses yang memadai terhadap makanan, air bersih, dan layanan kesehatan.

### 3. **Kerusakan Ekonomi dan Investasi Asing yang Berkurang**

Ketidakstabilan akibat konflik dan terorisme menghambat pertumbuhan ekonomi. Banyak perusahaan asing enggan berinvestasi di negara-negara yang dilanda kekerasan, menyebabkan kurangnya lapangan kerja dan memperburuk kemiskinan. Selain itu, sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan ekonomi justru digunakan untuk membiayai militer dan operasi keamanan.

#### 4. **Peningkatan Kejahatan dan Perdagangan Ilegal**

Dalam situasi konflik, kelompok kriminal berkembang pesat. Mereka terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan penyelundupan senjata. Kejahatan terorganisir ini semakin memperburuk ketidakstabilan di kawasan.

#### 5. **Pengaruh Terhadap Negara-Negara Tetangga**

Konflik di satu negara sering kali berdampak pada negara-negara tetangga. Misalnya, krisis di Sudan Selatan telah menyebabkan ketegangan dengan Uganda dan Kenya akibat arus pengungsi yang besar. Begitu juga dengan serangan Boko Haram di Nigeria yang berdampak pada negara-negara tetangga seperti Chad, Kamerun, dan Niger.

#### 6. **Hancurnya Infrastruktur dan Layanan Publik**

Konflik berkepanjangan menyebabkan infrastruktur penting seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit hancur. Hal ini semakin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang sudah rentan. Pemerintah sering kali tidak memiliki cukup dana atau kapasitas untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur akibat perang.

#### 7. **Erosi Kepercayaan terhadap Pemerintah dan Institusi Negara**

Ketika pemerintah gagal melindungi rakyatnya dari konflik dan serangan teroris, kepercayaan masyarakat terhadap negara semakin menurun. Hal ini menciptakan kondisi yang mendukung lebih banyak kekacauan dan ketidakpatuhan terhadap hukum.

Konflik internal dan terorisme di Afrika Sub-Sahara merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari sejarah kolonialisme, pemerintahan yang lemah, hingga eksploitasi sumber daya alam. Dampaknya sangat luas, mencakup krisis kemanusiaan, ketidakstabilan politik, dan kehancuran ekonomi. Oleh karena itu, solusi yang diperlukan harus bersifat komprehensif, mencakup pendekatan politik, ekonomi, dan sosial. Upaya seperti memperkuat pemerintahan yang transparan, meningkatkan akses ekonomi bagi masyarakat miskin, serta kerja sama internasional dalam mengatasi terorisme dan perdagangan senjata ilegal menjadi langkah penting dalam menciptakan stabilitas dan keamanan di kawasan ini.

### **Rekomendasi Strategis untuk meningkatkan stabilitas keamanan di Kawasan Sub-Sahara Afrika.**

Kami membuat rekomendasi ini untuk mengatasi terorisme dan konflik internal berdasarkan temuan penelitian. Studi ini menyarankan perlunya peningkatan kerja sama dan koordinasi internasional untuk memerangi masalah ini. Hal ini mencakup berbagi intelijen, mengoordinasikan upaya penegakan hukum, serta menerapkan langkah-langkah pengendalian perbatasan bersama. Studi ini juga menekankan bahwa peningkatan tata kelola pemerintahan dan penguatan institusi sangatlah penting. Upaya ini melibatkan penanggulangan korupsi, penegakan supremasi hukum, dan memastikan manajemen perbatasan yang efektif. Dengan memperkuat struktur pemerintahan, negara-negara dapat lebih baik dalam mencegah aliran senjata ilegal dan mengganggu aktivitas kelompok teroris serta bandit.

Selain itu, mengatasi akar permasalahan terorisme dan konflik internal sangatlah krusial. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan agar negara-negara di Afrika Sub-Sahara berinvestasi dalam pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan program kesejahteraan sosial

guna mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi serta memberikan jalur alternatif bagi individu yang terpinggirkan. Stabilitas keamanan di kawasan Sub-Sahara Afrika merupakan tantangan besar yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti konflik internal, terorisme, perdagangan senjata ilegal, serta lemahnya tata kelola pemerintahan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup penguatan tata kelola pemerintahan dan institusi keamanan, pengendalian perbatasan, pemberantasan terorisme, resolusi konflik, pembangunan sosial dan ekonomi, kerja sama internasional, serta pemberdayaan masyarakat sipil. Langkah-langkah ini harus diimplementasikan secara sistematis agar dapat menciptakan stabilitas yang berkelanjutan di kawasan.

Salah satu langkah utama yang harus dilakukan adalah **penguatan tata kelola pemerintahan dan institusi keamanan**. Pemerintahan yang lemah dan penuh dengan praktik korupsi sering kali menjadi pemicu ketidakstabilan, terutama ketika sumber daya negara disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, reformasi tata kelola pemerintahan harus difokuskan pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta supremasi hukum. Institusi keamanan, seperti militer dan kepolisian, perlu diperkuat dengan pelatihan dan peralatan yang memadai agar mereka dapat merespons ancaman dengan lebih efektif. Selain itu, reformasi sektor keamanan (Security Sector Reform/SSR) juga penting untuk memastikan bahwa aparat keamanan bekerja sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam menangani konflik internal maupun ancaman terorisme.

Selanjutnya, **pengendalian perbatasan dan pemberantasan perdagangan senjata ilegal** menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan Sub-Sahara Afrika. Banyak kelompok bersenjata dan teroris mendapatkan persenjataan mereka melalui perdagangan ilegal yang terjadi akibat lemahnya pengawasan di perbatasan. Oleh karena itu, kerja sama lintas negara harus ditingkatkan untuk memperketat pengawasan terhadap perdagangan senjata dan pergerakan kelompok bersenjata. Pemanfaatan teknologi, seperti sistem pengawasan berbasis satelit, drone, serta kecerdasan buatan, dapat digunakan untuk memantau aktivitas ilegal di daerah perbatasan yang luas dan sulit dijangkau. Selain itu, diperlukan kebijakan yang lebih ketat dalam pengelolaan kepemilikan senjata serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum untuk memberantas perdagangan senjata ilegal.

Dalam menghadapi ancaman **terorisme di kawasan Sub-Sahara Afrika**, pendekatan yang dilakukan tidak boleh hanya berbasis militer semata, tetapi juga harus mencakup pendekatan sosial, ekonomi, dan ideologis. Banyak kelompok teroris, seperti Boko Haram di Nigeria dan Al-Shabaab di Somalia, memanfaatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi untuk merekrut anggota baru. Oleh karena itu, strategi kontra-terorisme harus mencakup program deradikalisasi yang bertujuan untuk membimbing individu yang pernah terlibat dalam kelompok ekstremis agar dapat kembali ke masyarakat. Selain itu, kerja sama dengan organisasi regional dan internasional dalam berbagi intelijen serta melaksanakan operasi kontra-terorisme secara bersama-sama dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan kelompok teroris di wilayah ini.

Selain upaya kontra-terorisme, **resolusi konflik dan diplomasi preventif** juga perlu dikedepankan untuk mengatasi konflik internal yang berkepanjangan. Banyak konflik di Sub-Sahara Afrika berasal dari ketidakadilan politik, diskriminasi etnis, dan persaingan atas sumber daya alam. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih damai seperti mediasi dan negosiasi harus diutamakan melalui kerja sama dengan organisasi internasional seperti Uni Afrika (AU) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Diplomasi preventif juga harus diterapkan untuk mendeteksi potensi konflik sebelum berkembang menjadi perang skala besar. Partisipasi komunitas lokal, pemimpin adat, serta tokoh agama sangat diperlukan dalam menyelesaikan

konflik, mengingat mereka memiliki pengaruh besar dalam masyarakat.

Selain faktor keamanan, **pembangunan sosial dan ekonomi** juga harus menjadi prioritas dalam menciptakan stabilitas jangka panjang di Sub-Sahara Afrika. Kemiskinan dan ketimpangan sosial sering kali menjadi faktor utama yang membuat masyarakat rentan terhadap perekrutan oleh kelompok bersenjata dan teroris. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan, kesehatan, serta penyediaan lapangan kerja sangat diperlukan untuk mengurangi disparitas sosial dan memberikan alternatif bagi individu yang rentan terhadap radikalisme. Infrastruktur juga harus dikembangkan, terutama di daerah terpencil yang sering kali menjadi basis kelompok bersenjata, agar wilayah-wilayah tersebut dapat lebih terintegrasi dengan pusat ekonomi negara.

Untuk memastikan keberlanjutan dari berbagai strategi ini, **kerja sama internasional dan regional** perlu diperkuat. Negara-negara di kawasan Sub-Sahara Afrika harus mempererat hubungan dengan organisasi seperti Uni Afrika (AU), Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS), serta mitra internasional seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat dalam membangun strategi keamanan kolektif. Bantuan internasional dalam bentuk investasi dan dukungan teknologi juga sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah konflik. Selain itu, negara-negara di Sub-Sahara Afrika harus lebih aktif dalam berpartisipasi dalam misi penjaga perdamaian guna meningkatkan kapasitas dalam menangani konflik dan ancaman keamanan.

Terakhir, **pemberdayaan masyarakat sipil dan partisipasi publik** sangat penting dalam menciptakan stabilitas yang berkelanjutan. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan keamanan melalui dialog terbuka antara pemerintah dan warga. Program kesadaran publik tentang bahaya terorisme, perdagangan senjata ilegal, serta pentingnya persatuan nasional juga harus digencarkan. Media memiliki peran besar dalam menyebarkan informasi yang benar dan menangkal propaganda kelompok ekstremis. Selain itu, program deradikalisasi berbasis komunitas dapat menjadi solusi dalam mencegah masyarakat terpapar ideologi radikal sejak dini.

Dengan menerapkan rekomendasi strategis ini secara menyeluruh dan konsisten, diharapkan stabilitas keamanan di kawasan Sub-Sahara Afrika dapat meningkat. Stabilitas yang lebih baik akan membawa dampak positif bagi pembangunan sosial dan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta mendorong integrasi politik yang lebih kuat di kawasan tersebut. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional, perdamaian dan stabilitas di Sub-Sahara Afrika dapat diwujudkan dalam jangka panjang.

## KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Studi ini menegaskan bahwa terdapat hubungan yang erat antara terorisme dan konflik internal, dimana keduanya sering kali saling memperkuat. Kelompok teroris dan pelaku kriminal sering kali bergantung pada penyebaran persenjataan serta perbatasan yang lemah untuk menjalankan aksi mereka. Terorisme dan konflik internal menimbulkan risiko serius bagi keamanan nasional maupun internasional. Tindakan-tindakan ini mengancam stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan kohesi sosial, selain juga menyebabkan kematian serta kerusakan properti. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini sangat penting untuk menjaga stabilitas dan perdamaian. Selain itu, studi ini juga menyoroti berbagai faktor yang berkontribusi terhadap penyebaran senjata dan terorisme. Faktor-faktor tersebut mencakup perang regional, fanatisme agama, keluhan politik, serta ketidakadilan sosial-ekonomi.

- Untuk merumuskan kebijakan dan intervensi yang efektif, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai isu-isu mendasar ini.
2. Konflik internal dan terorisme di Afrika Sub-Sahara merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari sejarah kolonialisme, pemerintahan yang lemah, hingga eksploitasi sumber daya alam. Dampaknya sangat luas, mencakup krisis kemanusiaan, ketidakstabilan politik, dan kehancuran ekonomi. Oleh karena itu, solusi yang diperlukan harus bersifat komprehensif, mencakup pendekatan politik, ekonomi, dan sosial. Upaya seperti memperkuat pemerintahan yang transparan, meningkatkan akses ekonomi bagi masyarakat miskin, serta kerja sama internasional dalam mengatasi terorisme dan perdagangan senjata ilegal menjadi langkah penting dalam menciptakan stabilitas dan keamanan di kawasan ini.
  3. Stabilitas yang lebih baik akan membawa dampak positif bagi pembangunan sosial dan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta mendorong integrasi politik yang lebih kuat di kawasan tersebut. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional, perdamaian dan stabilitas di Sub-Sahara Afrika dapat diwujudkan dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahid, dkk, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, (Bandung:PT. Rafika Aditama)
- Amusan, L. (2022). *Tantangan Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan di Afrika*.
- Azeng, TF, & Yogo, TU (2013). *Pengangguran di kalangan pemuda dan ketidakstabilan politik di sejumlah negara berkembang*. Tunis, Tunisia: Bank Pembangunan Afrika.
- Bates, Robert. 1981. *Pasar dan negara Afrika tropis: Basis pertanian dari kebijakan pertanian*, Berkeley dan Los Angeles: University of California Press.
- Citaristi, I. (2022). Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Perlucutan Senjata—UNODA. Dalam *Direktori Organisasi Internasional Eropa 2022* (hlm. 244-246). Routledge.
- Couloumbis, T. A., & Wolfe, J. H. (1990). *Pengantar Hubungan Internasional Keadilan dan Power*. Bandung: Abardin.
- Edokat, ET, Ngongang, E., & Zeh, SRA (2023). Dampak konflik bersenjata terhadap pertumbuhan ekonomi di Afrika sub-Sahara. *Eximia*, 6, 28-56.
- Effendi, J. (2021). *Geografi Nasional Edisi: Asia Selatan, Asia Barat Daya, Afrika Utara, dan Afrika Subsahara*.
- Fagbemi, F., Nzeribe, GE, Osinubi, TT, & Asongu, S. (2021). Keterkaitan antara tata kelola dan kondisi sosial ekonomi: Memahami tantangan di Afrika sub-Sahara. *Keberlanjutan Regional*, 2 (4), 337-348.
- Forest, JJ (2022). Interaksi kejahatan-teror di Afrika sub-Sahara. *Studi Konflik & Terorisme*, 45 (5-6), 368-388.
- Foucher, V. (2021). *Waralaba Negara Islam di Afrika: Pelajaran dari Danau Chad*. International Crisis Group.
- Hadiwinata, BS (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Herbst, J. (1996). Menanggapi kegagalan negara di Afrika. *Keamanan internasional*, 21 (3), 120-144.

- Human Rights Watch. (2015). *Laporan dunia 2015: Peristiwa 2014*. Policy Press.
- Jackson, RH dan Rosberg, CG 1982. *Pemerintahan pribadi di Afrika kulit hitam*, Berkeley, CA: University of Berkeley Press.
- Jackson, RH, & James, A. (Eds.). (1993). *Negara-negara di dunia yang terus berubah: analisis kontemporer* (hal. 139). Oxford: Clarendon Press.
- John W. Creswell, *Educational Research: Planning, Conducting And Evaluating Quantitative And Qualitative Research: Fourth Edition* (Boston: Pearson Education 2011), hal.205.
- Karol, D., & Miguel, E. (2007). Biaya elektoral perang: korban perang di Irak dan pemilihan presiden AS tahun 2004. *Jurnal Politik*, 69 (3), 633-648.
- Kelman, HC (2006). Minat, hubungan, identitas: Tiga isu utama bagi individu dan kelompok dalam menegosiasikan lingkungan sosial mereka. *Annu. Rev. Psychol.*, 57 (1), 1-26.
- Lobell, S., & Mauzeri, P. (2004). *Konflik etnis dan politik internasional: menjelaskan penyebaran dan eskalasi*. Springer.
- Loudewjik. F Paulus, 2004, *Terorisme*, (Jakarta: republika)
- Mack, EA, Bunting, E., Herndon, J., Marcantonio, RA, Ross, A., & Zimmer, A. (2021). Konflik dan hubungannya dengan variabilitas iklim di Afrika Sub-Sahara. *Science of the Total Environment*, 775, 145646.
- Matthew B. Miles & A. Michael Huberman. "Qualitative Data Analysis". (California: SAGE Publication, 1994). Hal 10 – 11
- Melong, J. Lexy, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi," (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007) 4.
- Mudzakir, 2008, *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum bagi korban Terorisme*, (Jakarta: PT.Gramedia)
- Muladi, Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi, tulisan dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, Vol II No. 03 Desember 2002, Hal. 1.
- Piazza J. A., Von Hippel K. 2014. Does Poverty Serve as a Root Cause of Terrorism? In *Debating Terrorism and Counterterrorism: Conflicting Perspectives on Causes, Contexts, and Responses*, 2nd ed., 35-68, edited by Stuart Gottlieb. Thousand Oaks, CA: CQ Press, SAGE.
- Posen, B. R. (2001). The Struggle against Terrorism: Grand Strategy, Strategy, and Tactics. *International Security*, 26(3), 39–55. <http://www.jstor.org/stable/3092088>
- Russet, B., & Starr, H., & Kinsella, D. (2010). *World Politic: Menu for Choice*. Boston: Wadsworth.
- Sari, S., & Yani, Y. M. (2017). Revitalisasi Hubungan Amerika Serikat di Asia Pasifik. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 2(02), 4-17.
- Sheehan, M. (2011). *The Changing Character of War. The Globalization of World Politics- An Introduction to International Relations*. Baylis, J., & and Smith, S. (editor). New York: Oxford University Press.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. 20th. (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Williams, PD (2016). *Perang dan konflik di Afrika*. John Wiley & Sons.
- Wardoyo, B. (2015). Anatomi penyelesaian konflik internal di Suriah. *Analisis CSIS*, 43(2), 181-199.
- Widner, Jennifer A. 1995. Negara dan keadaan tanpa kewarganegaraan di Afrika pada akhir abad kedua puluh. *Daedalus*, 124 (3) : 129 – 153.
- Wilkinson, Paul. *Terorisme versus Demokrasi; Tanggapan Negara Liberal*. Routledge: Oxon, 2001.

## Internet

- Stephen, L. (1996). Gender, Kewarganegaraan, dan Politik Identitas. *Perspektif Amerika Latin* , 28 (6), 54-69. <https://doi.org/10.1177/0094582X0102800605>
- The Conversation (2021). What drives instability in Africa and what can be done about it. <https://theconversation.com/what-drives-instability-in-africa-and-what-can-be-doneabout-it-87626>.
- Ukaeje, O. (2022). Ketidakstabilan politik dan ketidakamanan di Afrika: implikasi terhadap agenda Uni Afrika 2063. *Jurnal Hubungan Internasional Kontemporer dan Diplomasi* , 3 (1), 443-466.
- Union, A. (2019). African Union. *Diperoleh dari Undang-Undang Dasar African Union*: [https://au.int/sites/default/files/pages/34873-file-constitutiveact\\_en.pdf](https://au.int/sites/default/files/pages/34873-file-constitutiveact_en.pdf)
- United States Institute of Peace (2021). Security challenges in Africa: 2021 and beyond. <https://www.usip.org/events/security-challenges-africa-2021-and-beyond/html>.
- Urdal, H., & Hoelscher, K. (2012). Menjelaskan kekacauan sosial dan kekerasan di perkotaan: Sebuah studi empiris mengenai data kejadian di kota-kota Asia dan sub-Sahara Afrika. *Interaksi Internasional* , 38 (4), 512-528.
- Wardhani, Baiq. 2020. "Internasionalisasi Konflik Etnis: Penentu, Difusi, Eskalasi." *Akademisi*.  
[https://www.academia.edu/971613/Internasionalisasi\\_Konflik\\_Etnis\\_Determinan\\_Difusi\\_Eskalasi](https://www.academia.edu/971613/Internasionalisasi_Konflik_Etnis_Determinan_Difusi_Eskalasi) (16 Januari 2024).